SINERGi

Menguatkan Integritas, Meneguhkan Pelayanan

BIMTEKNAS 2025 PKS

Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat



EDITORIAL

Bersama Membangun Kepemimpinan yang Berkarakter dan Berdampak



Majalah SINERGI hadir sebagai ruang inspirasi dan refleksi bagi para pejabat publik kader PKS di seluruh Indonesia. Di tengah dinamika sosial dan politik yang kian kompleks, kita membutuhkan ruang untuk berbagi gagasan, menguatkan nilai, dan menyalakan semangat kolaborasi lintas wilayah dan bidang pengabdian.

Melalui SINERGI, BPPP DPP PKS ingin menghadirkan narasi tentang kepemimpinan yang berintegritas, profesional, dan inovatif—sebuah corak kepemimpinan yang tak hanya piawai mengelola program, tetapi juga mampu menyentuh hati rakyat dengan keteladanan.

Edisi perdana ini bertepatan dengan Bimteknas PKS, momentum penguatan kapasitas pejabat publik PKS di seluruh Indonesia. Dari sini, kita belajar bahwa sinergi bukan sekadar kerja bersama, melainkan kesatuan niat dan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mari menjadikan SINERGI sebagai cermin dan cahaya. Cermin untuk menilai kembali sejauh mana kita menjaga amanah publik, dan cahaya untuk menuntun langkah menuju Indonesia yang lebih baik.

Redaksi SINERGI

SAMBUTAN KETUA BPPP DPP PKS

Hadirnya SINERGI:

Wadah Refleksi dan Inspirasi untuk Pelayan Rakyat



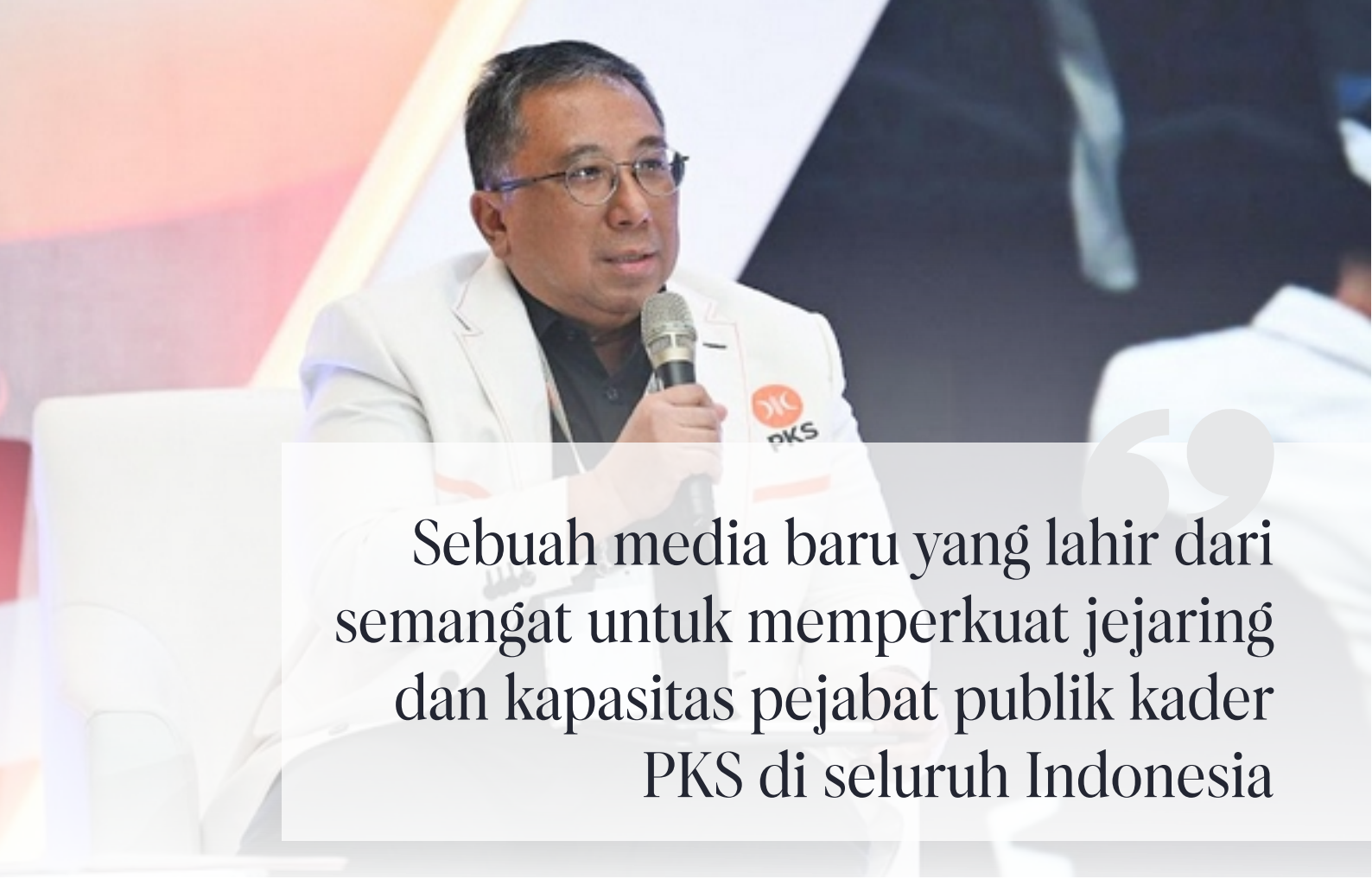
Dr. Haru Suandaru
Ketua BPPP DPP PKS

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyambut hadirnya Majalah SINERGI, sebuah media baru yang lahir dari semangat untuk memperkuat jejaring dan kapasitas pejabat publik kader PKS di seluruh Indonesia.

Majalah ini bukan sekadar ruang berbagi informasi, tetapi juga wadah refleksi, inspirasi, dan pembelajaran bersama. Di tengah tantangan kepemimpinan modern yang semakin kompleks, pejabat publik dituntut untuk memadukan profesionalitas, integritas, dan inovasi dalam setiap langkah pengabdian. SINERGI diharapkan menjadi salah satu sumber energi moral dan intelektual bagi para pemegang amanah publik agar senantiasa berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pandangan kami di Badan Pembinaan Pejabat Publik (BPPP), kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang tanggung jawab untuk menebar manfaat. Karena itu,



Sebuah media baru yang lahir dari semangat untuk memperkuat jejaring dan kapasitas pejabat publik kader PKS di seluruh Indonesia

BPPP terus berkomitmen mengembangkan program pembinaan yang sistematis—mulai dari peningkatan kapasitas manajerial, etika kepemimpin-an, hingga penguatan nilai-nilai keislam-an yang menjadi fondasi perjuangan PKS.

Edisi perdana SINERGI ini terbit bertepatan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) PKS, sebuah forum strategis yang mempertemukan seluruh pejabat publik PKS dari berbagai tingkatan. Dari momentum ini, kita belajar arti penting kolaborasi dan keselarasan gerak antara pusat dan daerah, antara legislatif dan eksekutif, antara gagasan dan kerja nyata.

Mari kita jadikan SINERGI sebagai jembatan kebaikan—yang menghubungkan ide dengan aksi, pengalaman dengan inspirasi, dan niat dengan dampak nyata bagi masyarakat.

Selamat atas terbitnya Majalah SINERGI.

Semoga menjadi media yang mencerahkan, memperkuat komitmen kita sebagai pelayan rakyat, dan menjadi saksi lahirnya kepemimpinan yang berintegritas, profesional, dan inovatif.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dr. Haru Suandaru
Ketua BPPP DPP PKS

SAMBUTAN PRESIDEN PKS

Menyambut Kelahiran Majalah SINERGI

Energi Baru untuk Pejabat Publik



Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyambut hadirnya Majalah SINERGI, sebuah media baru yang lahir dari semangat untuk memperkuat jejaring dan kapasitas pejabat publik kader PKS di seluruh Indonesia.

Majalah ini bukan sekadar ruang berbagi informasi, tetapi juga wadah refleksi, inspirasi, dan pembelajaran

bersama. Di tengah tantangan kepemimpinan modern yang semakin kompleks, pejabat publik dituntut untuk memadukan profesionalitas, integritas, dan inovasi dalam setiap langkah pengabdian. SINERGI diharapkan menjadi salah satu sumber energi moral dan intelektual bagi para pemegang amanah publik agar senantiasa berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pandangan kami di Badan Pembinaan Pejabat Publik (BPPP), kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang tanggung jawab untuk menebar manfaat. Karena itu,



Pejabat publik PKS dituntut tidak hanya untuk menguasai tugas administratif, tetapi juga memimpin dengan profesionalitas, bekerja dengan integritas, dan berinovasi demi kesejahteraan rakyat

Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
Presiden PKS

SAMBUTAN KETUA MAJELIS SYURO PKS

Sambut Lahirnya Majalah SINERGI

Bersinergi untuk Kemaslahatan Rakyat



Dr. Mohammad Sohibul Iman
Ketua Majelis Syura PKS

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah mempertemukan kita dalam satu semangat besar untuk membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Kehadiran Majalah SINERGI ini saya sambut dengan penuh rasa syukur dan harapan.

Majalah ini bukan sekadar penerbitan periodik, tetapi bagian dari gerak peradaban yang sedang kita bangun bersama. Ia lahir dari kebutuhan untuk memperkuat kesadaran, arah, dan nilai-nilai kepemimpinan di tengah para pejabat publik kader PKS di seluruh Indonesia.

Sebagaimana kita yakini bersama, politik bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan amanah untuk menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, setiap pejabat publik PKS harus menampilkan corak kepemimpinan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan rakyat. Dalam konteks inilah, SINERGI menjadi penting—karena ia berfungsi sebagai ruang inspirasi, refleksi, dan pembelajaran antarpejabat publik agar terus tumbuh dan berkontribusi nyata.

Tema sinergi sangat relevan

dengan semangat jamaah yang menjadi DNA perjuangan kita. Tidak ada keberhasilan individu tanpa kekuatan kolektif. Tidak ada kemajuan daerah tanpa kolaborasi lintas peran dan lintas lembaga. Dengan sinergi, kita menautkan gagasan dengan gerakan, nilai dengan kebijakan, dan visi dakwah dengan kerja politik yang berkeadaban.

Saya berharap Majalah SINERGI menjadi media yang mampu menyalakan kesadaran kolektif: bahwa pejabat publik PKS bukan hanya pelaksana program, tetapi juga penggerak perubahan dan teladan moral di ruang-ruang publik.

Mari kita jadikan setiap halaman SINERGI sebagai cermin pengabdian, sumber inspirasi, dan penguat tekad untuk terus melangkah dengan niat yang lurus dan kerja yang tuntas.

Selamat atas terbitnya edisi perdana Majalah SINERGI.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita agar tetap berada di jalan perjuangan yang diridhai-Nya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

> Dengan sinergi, kita menautkan gagasan dengan gerakan, nilai dengan kebijakan, dan visi dakwah dengan kerja politik yang berkeadaban."





Menegakkan Kepercayaan Publik

Jalan PKS Menuju Good Political Party Governance

Oleh
Muhammad Kholid, S.E., M.Si.
Sekretaris Jenderal PKS

Di tengah dinamika demokrasi yang semakin kompleks, partai politik menghadapi ujian besar: krisis kepercayaan publik. Survei Indikator Politik Indonesia (Mei 2025) menunjukkan partai politik masih berada di posisi paling bawah dalam tingkat kepercayaan masyarakat – hanya 7,4% yang "sangat percaya" dan 58,2% yang "cukup percaya". Padahal, kepercayaan adalah fondasi demokrasi. Tanpa trust, kebijakan politik yang benar pun akan kehilangan legitimasi moral.

Krisis ini lahir dari persepsi yang terus berulang: partai dianggap elitis, berpihak pada kepentingan kelompok kecil, dan gagal melahirkan kepemimpinan publik yang berkualitas. Maka, jawabannya bukan sekadar perbaikan citra, tetapi perubahan sistemik dalam tata kelola partai politik – sebuah konsep yang dalam PKS disebut Good Political Party Governance.

Tata Kelola Partai yang Bernilai dan Terukur

Partai Keadilan Sejahtera percaya bahwa kekuatan sejati politik tidak terletak pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat. Karena itu, PKS menegakkan lima pilar tata kelola partai yang baik, sebagai arah pembenahan menuju partai modern, kredibel, dan berintegritas.

1 Kepemimpinan Berbasis Nilai (Values-Based Leadership)

PKS digerakkan oleh nilai-nilai dasar: bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai ini bukan jargon moral, melainkan legitimasi utama kepemimpinan. Dalam istilah Syuro, inilah al-qiyam tastahiqqun najah — nilai-nilai yang membuat kita layak untuk menang, bukan karena taktik, tapi arena ketulusan perjuangan.

2 Manajemen Berbasis Tujuan (Management by Objective)

Setiap program partai harus menjawab pertanyaan: Apa dampaknya bagi kader, kaderisasi, dan pemenangan pemilu? DPP PKS periode 2025–2030 memfokuskan kerja pada tiga hal: Kader, Kaderisasi, dan Pemenangan (K2P2) — sebuah model manajemen politik yang orientatif pada hasil dan dampak sosial, bukan sekadar aktivitas rutin.

3 .Tradisi Kecerdasan Kolektif (Collective Genius)

PKS menumbuhkan tradisi musyawarah, literasi, dan inovasi. Politik tidak boleh menjadi ruang sentimen dan emosi, melainkan ruang rasionalitas dan argumentasi. Di sini setiap kader belajar berpikir ilmiah, berdebat dengan adab, dan berinovasi dengan keberanian moral.

4 Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)

Setiap keputusan partai harus berpijak pada data dan ilmu pengetahuan. Politik yang baik bukan yang keras suaranya, tapi yang kuat dasarnya. Dengan pendekatan berbasis bukti, partai menjadi institusi pembelajaran (learning organization) yang rasional dan berpihak pada kemaslahatan publik.

5 Kerja Kolaboratif (Collaborative Action)

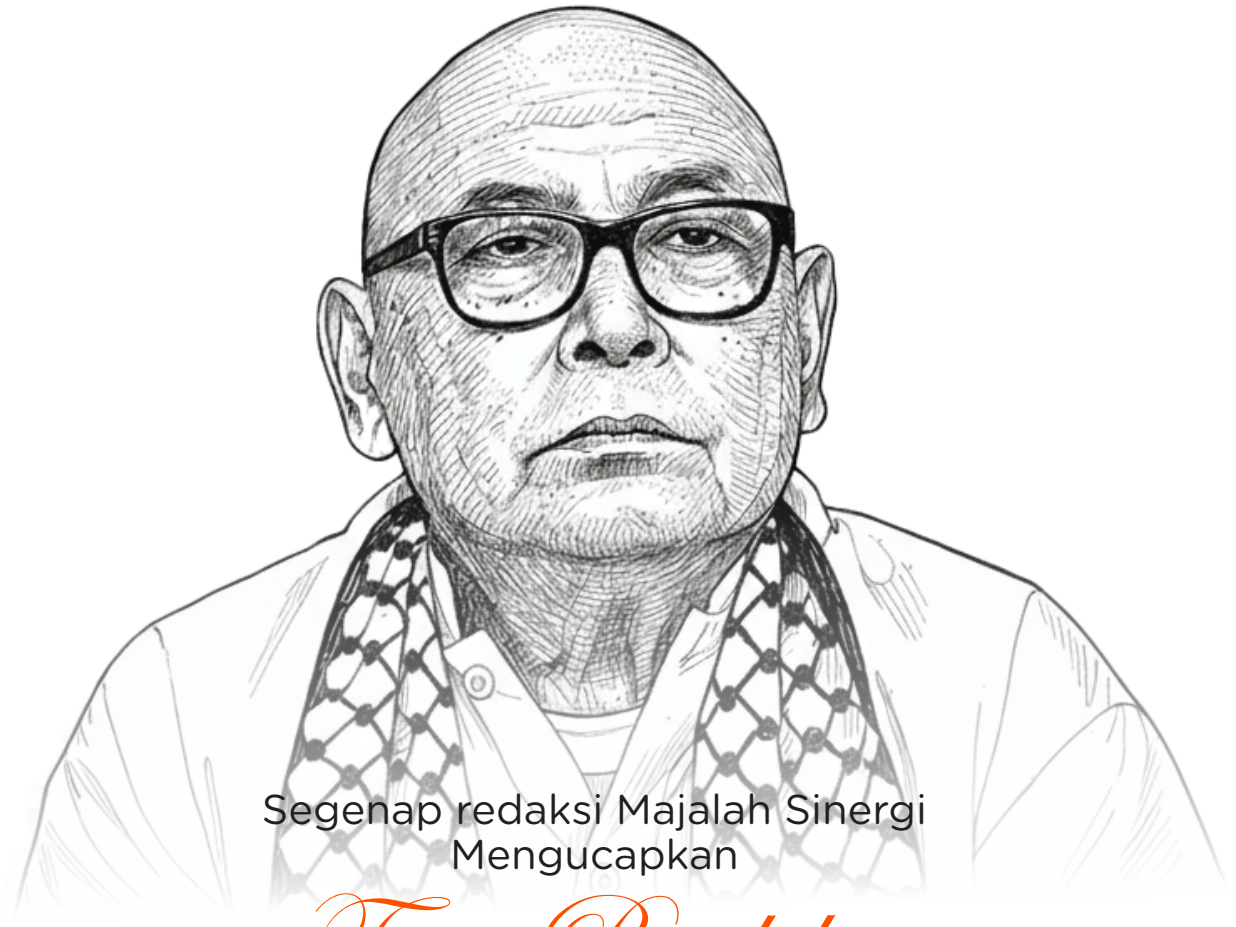
Dalam konteks bangsa yang majemuk, PKS menegakkan prinsip berbagi nilai, komitmen, dan tanggung jawab bersama. Politik yang baik adalah politik yang mengajak banyak pihak bekerja dalam semangat shared values dan shared responsibility — demi keadilan dan kesejahteraan yang lebih luas.

Kekuatan sejati politik tidak terletak pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat

Muhammad Kholid, S.E., M.Si.
Sekjen DPP PKS



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



Segenap redaksi Majalah Sinergi
Mengucapkan

Turut Berduka

atas wafatnya

H. Soeripto, SH

Pendiri & Ketua Umum Komite Nasional
Rakyat Palestina (KNRP)

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta diampuni
segala kesalahan-nya. Amin



Quo Vadis Pejabat Publik:
Antara Kekuasaan dan Pengabdian

Oleh
Dr. Mohamad Sohibul Iman
Ketua Majelis Syuro PKS

Ada masa ketika jabatan dipandang sebagai puncak pencapaian. Di sanalah kemuliaan disematkan, penghormatan disuguhkan, dan kuasa seolah menjadi takhta yang memberi hak untuk "menikmati". Namun sejarah selalu mengajarkan: kekuasaan tanpa kesadaran adalah sumber kerusakan.

Kita sedang hidup di era di mana kesenjangan pendapatan dan akses lahan kian lebar, perilaku koruptif menjadi tontonan harian, dan para elite kehilangan kemampuan membedakan ruang pribadi dari ruang publik. Fenomena "flexing" dan gaya hidup yang nir empati menjauhkan pejabat publik dari makna sejatinya: pelayan masyarakat.

Dalam terminologi Barat, dikenal ungkapan "to lead is to suffer" – memimpin adalah menderita. Dalam Islam, sabda Nabi menegaskan: "Sayyidul qoum khodimuhum" – pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Dua bahasa berbeda, tapi satu makna: pemimpin sejati bukan yang menikmati fasilitas, tetapi yang menanggung beban.

Misi Kepemimpinan PKS: Pemerintah yang Melayani

PKS memandang kekuasaan bukan

sebagai kehormatan, melainkan sebagai amanah. Jabatan publik adalah tanggung jawab, bukan kebanggaan. Karena itu, pejabat publik dari PKS diharapkan hadir dengan sepenuh hati, jiwa, tenaga, waktu, pikiran, bahkan harta, untuk melayani masyarakat.

Ia harus qanaah dengan rezeki yang sah dan resmi, tak rakus mengambil hak rakyat, menjaga kepatutan publik, dan menolak hidup dalam simbol kemewahan. Dalam bahasa yang sederhana, pejabat publik PKS harus hidup fungsional – bukan seremonial.

Kepuasan seorang pejabat publik bukanlah pada fasilitas atau kekayaan, melainkan pada kemampuannya membantu dan mengadvokasi masyarakat. Ia tidak lahir untuk memperkaya diri, melainkan untuk memperkaya kehidupan orang lain.

Empat Prinsip Pengabdian

Ada empat prinsip dasar yang mesti dipegang teguh oleh siapa pun yang diberi amanah publik:

1 **Kekuasaan bukan jaminan kenyamanan, melainkan ujian tanggung jawab.**

Semakin besar kewenangan, semakin sempit ruang privat seorang pejabat publik. Ia harus rela "menderita" dalam pengertian positif – membatasi diri demi menjaga amanah.

2 **Kekuasaan menuntut kesadaran, bukan kesemenaan.**

Makin tinggi posisi, makin rendah

"Kepuasan seorang pejabat publik... pada kemampuannya membantu dan mengadvokasi masyarakat. Ia tidak lahir untuk memperkaya diri, melainkan untuk memperkaya kehidupan orang lain."

egonya. Sebab kekuasaan sejati bukanlah kemampuan memerintah, tapi kemampuan menahan diri.

3 Pemimpin tidak hidup untuk dirinya sendiri.

Ia menjadi jembatan antara rakyat dan harapan. Ia hadir bukan untuk disanjung, tetapi untuk menanggung.

4 Kepuasan pejabat publik terletak pada kebermanfaatan.

Ketika rakyat tersenyum karena urusannya dimudahkan, di sanalah kebahagiaan seorang pemimpin sejati lahir.

Menjaga Jiwa di Tengah Ujian Kekuasaan

Allah telah menegur generasi terbaik di medan Uhud, ketika sebagian di antara mereka tergoda oleh hasil rampasan perang. Dalam Surah Ali Imran ayat 152, Allah berfirman:

مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيَا وَمِنكُم
مَّن يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۚ

"Di antara kamu ada yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat..."

Ayat ini bukan hanya sejarah, tapi cermin. Setiap pejabat publik diuji: apakah ia menghendaki dunia atau akhirat. Apakah ia menjadikan jabatan sebagai tangga menuju ridha Allah, atau jebakan menuju kehancuran moral.

Meneguhkan Jalan Pengabdian

Pejabat publik PKS harus tampil sebagai teladan. Di tengah badai pragmatisme politik, ia adalah jangkar moral yang meneguhkan integritas. Ia sadar bahwa pengabdian lebih tinggi daripada gengsi, dan pelayanan lebih mulia daripada penampilan.

Kita tidak sedang membangun kerajaan kekuasaan, tetapi peradaban pelayanan. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan soal berapa lama seseorang berkuasa, tetapi berapa lama nilai-nilainya bertahan setelah ia pergi.

Penutup

Menjadi pejabat publik adalah panggilan untuk menyusahkan diri demi memudahkan orang lain. Bukan jalan menuju kemewahan, tetapi jalan sunyi menuju kemuliaan. Dan dalam jalan itulah, kita berharap ridha Allah menjadi akhir dari setiap langkah pengabdian. Sebagaimana janji-Nya dalam Al-Qur'an:

وَٱللَّهُ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٥٢

"Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman." (Ali Imran: 152)

Dr. Mohamad Sohibul Iman
Ketua Majelis Syuro PKS

Dr. Sohibul Iman (Ketua Majelis Syura PKS) :

Quo Vadis Pejabat Publik:

Antara Kekuasaan dan Pengabdian

Krisis Kepemimpinan di Era Modern



- Kesenjangan pendapatan & akses lahan kian lebar
- Perilaku koruptif jadi tontonan harian
- Fenomena "flexing" & gaya hidup nir empati
- Pejabat jauh dari makna sejati: pelayan masyarakat

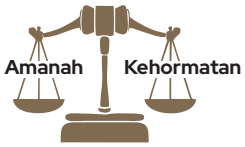
Barat vs Islam

Barat	Islam
"To lead is to suffer" (Memimpin adalah menderita)	*Sayyidul qoum khodimuhum"* (Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka)

Konklusi

"Pemimpin sejati bukan yang menikmati fasilitas, tetapi yang menanggung beban"

Kekuasaan adalah Amanah, Bukan Kehormatan



- **Prinsip:** Hidup fungsional, bukan seremonial
- **Sikap:** Qanaah dengan rezeki yang sah, menolak simbol kemewahan
- **Tujuan:** Memperkaya kehidupan orang lain, bukan diri sendiri
- **Kepuasan:** Pada kemam-pu-an membantu dan mengadvokasi masyarakat



"Pejabat publik PKS harus hidup fungsional bukan seremonial"



Memimpin adalah menderita dalam pengertian positif

Prinsip Dasar Pejabat Publik PKS

- **Ujian Tanggung Jawab**
  "Semakin besar kewenangan, semakin sempit ruang privat"
- **Kesadaran, Bukan Kesemenaan**
  "Makin tinggi posisi, makin rendah egonya"
- **Hidup untuk Orang Lain**
  "Hadir bukan untuk disanjung, tetapi untuk menanggung"
- **Kebermanfaatan sebagai Kepuasan**
  "Kebahagiaan pemimpin ketika rakyat tersenyum"

Menuju Peradaban Pelayanan



Visi:
"Kita tidak membangun kerajaan kekuasaan, tetapi peradaban pelayanan"

Komitmen:
"Pejabat publik PKS adalah jangkar moral di tengah badai pragmatisme"

Definisi Sukses:
"Bukan soal berapa lama berkuasa, tapi berapa lama nilainya bertahan"

Bergabunglah dalam perjalanan menuju kepemimpinan yang bermakna.
Dukung pejabat publik yang mengutamakan pengabdian di atas kekuasaan."

SINERGi
Menguatkan Integritas, Meneguhkan Pelayanan

Memperingati

Hari Pahlawan

10 November 2025

Jas Merah.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Hari ini 78 tahun lalu, arek-arek Suroboyo menunjukkan pada dunia arti keberanian sejati. Kita lanjutkan perjuangan mereka di era baru.
Hormat kami untuk para pahlawan.





Legislator yang Menyatu dengan Rakyat

Oleh
Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si.
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Di tengah riuh dinamika politik nasional, di mana suara rakyat kerap tenggelam di antara hiruk pikuk kepentingan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berusaha menjaga arah perjuangannya tetap lurus: menghadirkan politik yang melayani. Semangat itu tampak kuat dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025, sebuah forum konsolidasi dan pembinaan besar bagi para pejabat publik dan wakil rakyat PKS di seluruh Indonesia.

Salah satu tokoh yang memberi warna penting dalam forum ini adalah Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Fraksi PKS DPR RI yang baru saja dipercaya menakhodai barisan wakil rakyat PKS di Senayan. Bagi Abdul Kharis, politik bukan semata seni berebut kekuasaan, tetapi seni menghadirkan manfaat. "Menjadi anggota legislatif itu bukan soal berapa banyak undang-undang yang dibuat, tetapi seberapa nyata kebijakan itu menjawab kebutuhan rakyat," ujarnya dalam satu kesempatan.

Sebagai legislator yang kini juga menjabat pimpinan Komisi IV DPR RI—membidangi pertanian, kelautan, dan pangan—Abdul Kharis memahami betul bahwa kesejahteraan rakyat dimulai dari hal paling mendasar:

ketersediaan pangan, lapangan kerja, dan kehidupan yang layak. Karena itu, dalam kerangka Bimteknas, ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar terimplementasi di akar rumput. "Kebijakan yang lahir di Senayan hanya akan berarti jika hidup di sawah, di pasar, dan di rumah rakyat," katanya.

Pandangan itu sejalan dengan visi besar PKS: mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai pelayanan. Di Bimteknas, Abdul Kharis menegaskan bahwa anggota legislatif—baik di pusat maupun daerah—harus menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan keputusan kebijakan. Mereka bukan sekadar penyampai aspirasi, melainkan pengawal perubahan. Ia mengingatkan bahwa rakyat menilai bukan dari seberapa sering legislator tampil di layar, tetapi dari seberapa terasa kehadirannya dalam kebijakan yang memudahkan hidup mereka.

Dalam berbagai kesempatan, Abdul Kharis menunjukkan teladan itu. Ia turun ke lapangan meninjau bantuan alat mesin pertanian (alsintan), berdialog dengan petani dan nelayan, memastikan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan tepat sasaran. Bagi Kharis, legislasi yang baik harus menyatu dengan realitas. Ia mengingatkan para kader legislatif PKS agar tidak terjebak dalam formalitas politik, tetapi bekerja berbasis data, bukti, dan kebutuhan nyata masyarakat.

Sebagai Ketua Fraksi, ia juga ber-

"Menjadi anggota legislatif itu bukan soal berapa banyak undang-undang yang dibuat, tetapi seberapa nyata kebijakan itu menjawab kebutuhan rakyat."



upaya memperkuat integritas kelembagaan fraksi agar solid, profesional, dan responsif terhadap persoalan rakyat. Ia menegaskan bahwa kekuatan PKS bukan pada jumlah, melainkan pada kualitas dan kredibilitas. Karena itu, ia mendorong peningkatan kapasitas anggota legislatif melalui pembinaan berkelanjutan, termasuk dalam forum Bimteknas yang digelar secara sistematis oleh Badan Pembinaan Pejabat Publik (BPPP) DPP PKS.

Abdul Kharis melihat bahwa masa depan politik pelayanan membutuhkan inovasi kepemimpinan. Di era digital dan keterbukaan informasi, wakil rakyat harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Ia mendorong agar para legislator PKS membangun jejaring kolaboratif dengan kepala daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan berbasis solusi. "Sinergi adalah kunci," ujarnya. "Tidak ada kesejahteraan yang bisa dicapai tanpa kerja bersama."

Bagi Kharis, sinergi kebaikan ini tidak hanya berarti kolaborasi antarlembaga, tetapi juga penyatuan hati dan semangat antarpejabat publik PKS di semua level. Ia memandang Bimteknas sebagai wadah untuk menyamakan visi dan meneguhkan arah perjuangan. Dalam forum seperti itu, para kepala daerah, anggota DPRD, hingga legislator nasional saling bertukar pengalaman, merumuskan strategi, dan belajar bagaimana mengelola amanah publik dengan integritas dan profesionalitas tinggi.

Lebih jauh, Abdul Kharis percaya bahwa politik bisa menjadi ruang ibadah yang luas bila dijalani dengan niat yang lurus dan kompetensi yang mumpuni. Karena itu, ia mendorong setiap kader legislatif untuk menjadikan Bimteknas sebagai momentum introspeksi dan pembaruan. "Kita harus terus belajar, memperbaiki cara kerja, dan memperkuat niat melayani. Sebab kekuasaan tanpa pembinaan hanya akan melahirkan kesombongan," tuturnya.

Melalui kepemimpinan Abdul Kharis, Fraksi PKS di DPR bertekad menjadi contoh bagaimana parlemen bisa menjadi mitra rakyat, bukan menara gading yang jauh dari realitas. Ia ingin memastikan bahwa setiap keputusan politik yang diambil mengandung nilai maslahat, efisiensi, dan keadilan. Dalam kerangka besar itu, Bimteknas hadir sebagai ruang kaderisasi yang menanamkan nilai-nilai profesionalitas, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.

"Rakyat menunggu bukti, bukan janji," ujarnya menutup sesi dengan nada reflektif. "Dan bukti terbaik adalah hadirnya kesejahteraan di kehidupan mereka, dari kebijakan yang kita perjuangkan dengan hati bersih dan pikiran jernih."

“Sinergi adalah kunci. Tidak ada kesejahteraan yang bisa dicapai tanpa kerja bersama.”

Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si.

Ketua Fraksi PKS DPR RI




SINERGI
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat
Simple Strategy